



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

REPUBLIK INDONESIA

No : 0389/O/1990

TENTANG

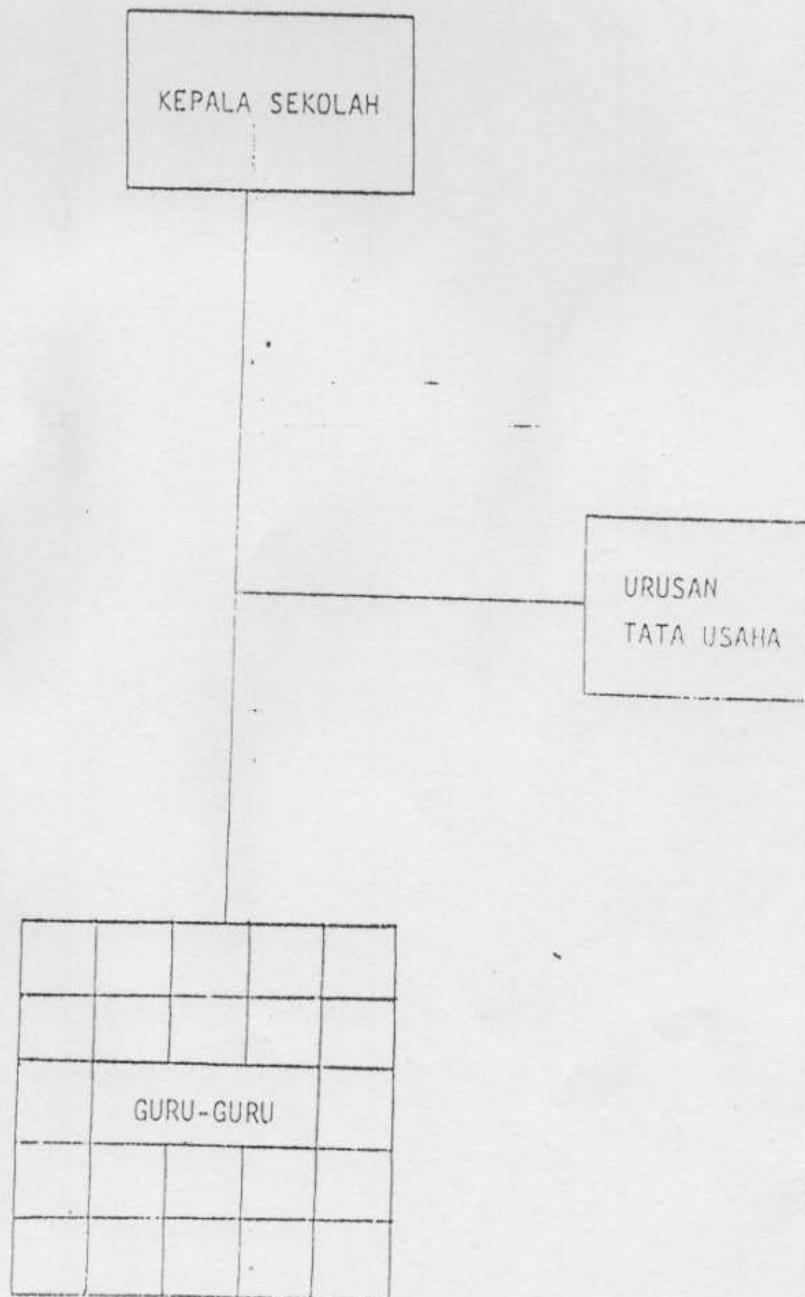
**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991**

1	2	3	4	5	6
16. <u>KALIMANTAN TIMUR</u> PEMBUKAAN					
	1.	SMP Negeri 2 Pasir Blengkong	Pasir Blengkong	Kabupaten Pasir	09.1.2.1038.23.01.16.110 09.1.2.1038.23.01.16.120
	2.	SMP Negeri 6 Tanjung Palas	Tanjung Palas	Kabupaten Bulungan	09.1.2.1038.23.01.16.150 09.1.2.1038.23.01.16.210 09.1.2.1038.23.01.16.220
	3.	SMP Negeri 4 Kota Bangun	Kota Bangun	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.230 09.1.2.1038.23.01.16.250 09.1.2.1038.23.01.16.360
	4.	SMP Negeri 2 Samboja	Samboja	Kabupaten Kutai	
	5.	SMA Negeri 3 Tenggarong	Tenggarong	Kabupaten Kutai	
	6. ✓	SMA Negeri 6 Samarinda	Samarinda	Kodya Samarinda	
	7.	STM Negeri Bontang	Bontang	Kabupaten Kutai	09.1.6.1102.23.01.16.110 09.1.6.1102.23.01.16.120 09.1.6.1102.23.01.16.150 09.1.6.1102.23.01.16.210 09.1.6.1102.23.01.16.220 09.1.6.1102.23.01.16.230 09.1.6.1102.23.01.16.250 09.1.6.1102.23.01.16.360

LAMPIRAN I, II : Keputusan Menteri Pendidikan
Kebudayaan tanggal 11 Juni
No. 0389/0/1990.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri dan Undang-undang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0389 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990

Menimbang

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menerangkan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1985;
 - e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985;
 - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menerangkan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagian struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom-7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SLB Negeri ada 22 buah;
- b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
- d. STM Negeri ada 173 buah;
- e. SMEA Negeri ada 310 buah;
- f. SMSR Negeri ada 7 buah;
- g. SMKK Negeri ada 84 buah;
- h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
- i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;
- j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah.

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rahmat RT:XXII/05, Telepon 230551 Samarinda (75)

Nomor : 2625/I26.2a/Ie/1990

25 Juli 1990

Lampiran : Satu (1) rangkap

Perihal : Keputusan Mendikbud RI
Nomor 0389/0/1990

Kepada

Yth. : 1. Kepala Bagian / Bidang :

2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya :

3. Kepala SLTP/SLTA Negeri : *SMP Negeri 6 Samarinda*
di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.

Bersama ini kami sampaikan fotokopi Keputusan Mendikbud RI Nomor 0389/0/1990 tanggal 11 Juni 1990 tentang "Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1990/1991" Khusus untuk Propinsi Kalimantan Timur bernifat "Pembukaan Unit Baru".

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



Koordinator Urusan Administrasi,

Drs. R. PRASETYO SOEKADI
NIP. 130122232

Tembusan Yth :

1. Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta

2. Kepala Biro Organisasi Depdikbud, Jakarta